

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menentukan suatu kebijakan, dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut pemerintah berupaya menghadirkan program-program yang pada hakikatnya program tersebut dirancang untuk kepentingan umum atau khalayak. Merupakan suatu pengabdian terhadap masyarakat apabila mereka mampu memberikan sesuatu yang terbaik dimasa yang akan datang. Setidaknya masyarakat mengakui keberadaan pemerintah dan berusaha membantu program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah, dalam hal ini pembangunan dibidang pendidikan.

Realisasi dari program pemerintah menjadi sebuah jembatan agar terciptanya kesadaran bagi masyarakat. Karena pada dasarnya, pemerintah merupakan lembaga yang diberi mandat untuk mengangkat derajat rakyat, membebaskan rakyat dari kemiskinan dan keterbelakangan, membebaskan rakyat dari kebodohan atau buta huruf serta mampu memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara baik, maksimal dan tepat guna.

Realisasi program memberikan kesan dan nilai kepada pemerintah bahwa lembaga pemerintah ini telah menciptakan sebuah konsep Good Governance. Dalam konsep pembangunan pada bidang pendidikan, pemerintah dituntut untuk mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan,

rancangan program bidang pendidikan dan pelaksanaan program pendidikan. Selain itu dalam menjalankan tugasnya, pemerintah harus bersikap transparan dan tanggung jawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, social dan ekonomi didasarkan pada consensus masyarakat serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut alokasi sumberdaya pembangunan dibidang pendidikan.

Program-program yang dirancang pemerintah bertujuan untuk pembangunan pendidikan yang menginginkan adanya suatu perubahan yang mengarah pada perbaikan dan kemajuan dalam hal ini pada bidang pendidikan sehingga menciptakan tujuan yang telah ditetapkan mampu terlaksana. Pelaksanaan pembangunan pada bidang pendidikan diorientasikan untuk mencapai pembangunan yang adil dan merata sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan pasal 3 dan 4 Undang – undang No 02 tahun 1989 menyatakan bahwa ”mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam upaya mewujudkan tujuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu untuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki

pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebudayaan”¹.

Kunci sukses pembangunan tidak hanya berasal dari program-program pemerintah yang matang, namun perlu diperhatikan pula hal-hal yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan tersebut. Pemerintah perlu memperhatikan kestabilan politik dan keamanan, memilih individu-individu yang ahli dibidang pembangunan dalam hal ini pembangunan dibidang pendidikan, bersikap realistis yang berarti pemerintah mampu menyesuaikan sumber daya dana yang tersedia, memiliki koordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang membantu dalam proses pembangunan dibidang pendidikan, serta sistem pemantauan dan pengawasan yang dilakukan secara terus menerus dan adanya transparansi yang dapat diterima oleh masyarakat.

Dalam melaksanakan program-programnya, pemerintah mengacu pada sebuah perencanaan sebagai titik tolak dalam merealisasikan sebuah program, yang mana rencana tersebut disusun terlebih dahuludengan melihat kondisi atau latar belakang obyek. Perencanaan merupakan suatu media atau alat untuk mencapai tujuan secara lebih baik dan teratur. Maka sangatlah diperlukan suatu perencanaan dalam pembangunan, yang mana dalam perencanaan pembangunan tersebut diharapkan dapat mampu memberikan arah proses pembangunan. Suatu pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan diperlukan perencanaan yang

¹ Undang-undang Nomor. 2 pasal 3 dan 4 tentang “Sistem Pendidikan Nasional”, Sinar Grafika, Jakarta, tahun 1992, halaman 23.

matang agar dalam prosesnya, pembangunan akan berjalan dengan baik atau setidaknya mampu mengurangi hambatan-hambatan yang akan menjadi penghalang dalam mencapai tujuan pembangunan itu sendiri. Perencanaan merupakan proses pemikiran dugaan dan penentu prioritas yang harus dilakukan secara rasional sebelum melakukan tindakan yang sebenarnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu perencanaan juga merupakan kegiatan-kegiatan rohaniah sebelum melakukan tindakan jasmaninya. Untuk itu diperlukan dalam rangka mengarahkan tujuan dan sasaran organisasi maupun tujuan suatu program pembangunan².

Dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Nasional maka sasaran utama adalah pembangunan Daerah Kabupaten. Perencanaan pembangunan dibidang pendidikan yang terdapat di Kabupaten Purwakarta merupakan tanggung jawab penuh dari pemerintah Kabupaten Purwakarta. Pembangunan dibidang pendidikan merupakan bagian dari pembangunan yang tidak dapat dipisahkan dari rencana pembangunan secara universal atau keseluruhan. Permasalahan yang muncul di Kabupaten Purwakarta dibidang pendidikan pada dasarnya yaitu kurang memadainya sarana dan prasarana pendidikan dimasyarakat, kurangnya pengetahuan serta informasi yang luas mengenai pendidikan dimasyarakat dan faktor keterbatasan ekonomi dimasyarakat. Disamping itu kebijakan yang ada di Kabupaten selama ini terkesan didominasi oleh kebijakan *top-down*, hal ini terjadi

² Inu Kencana Syafi'ie. Djamiludin Tanjung. Supardan Modeong, "Ilmu Administrasi Publik", Rineka Cipta, Jakarta, tahun 1999, halaman 76-77.

karena perencanaan *bottom-up* tidak terlaksana sepenuhnya seperti yang diharapkan³. Misalnya kebijakan pendidikan yang telah disusun oleh pemerintah dalam rangka peningkatan perluasan dan pemerataan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dimasyarakat pada tingkat Pendidikan Dasar.

Pada kenyataannya masyarakat di Kabupaten Purwakarta banyak yang belum dapat sepenuhnya mengenyam pendidikan sebagaimana mestinya serta banyak masyarakat di Kabupaten Purwakarta yang belum dapat melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi, hal ini disebabkan oleh faktor perekonomian dimasyarakat, karena masih banyaknya masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan, faktor sosial dan budaya seperti keterbatasan pengetahuan dan informasi yang luas mengenai pendidikan, dan faktor politik seperti kondisi politik Nasional yang kurang stabil sehingga mengakibatkan memanasnya suhu politik di Kabupaten yang berdampak pada terhambatnya pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten. Maka dari itu jika dilihat dari permasalahan dibidang pendidikan seperti yang telah dikemukakan diatas, maka masalah pendidikan menjadi masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

Dalam mengatasi masalah pendidikan khususnya dalam megimplementasikan kebijakan peningkatan perluasan dan pemerataan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dimasyarakat pada tingkat SD dan SMP di Kabupaten Purwakarta, maka pemerintah Kabupaten Purwakarta telah

³ Rencana Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta (Renstra) tahun 2006-2010, halaman 1.

menetapkan Peraturan Daerah maupun Keputusan Bupati agar permasalahan yang berhubungan dengan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta dapat diatasi.

Kegiatan pembinaan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan berada dibawah koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta serta bekerjasama dengan instansi lain terkait dan segenap lapisan masyarakat. Hal ini sesuai dengan kebijakan Dinas Pendidikan dalam peningkatan perluasan dan pemerataan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dimasyarakat pada tingkat SD dan SMP di Kabupaten Purwakarta, kebijakan dan program tersebut sangat penting sebagai pedoman kerja bagi semua anggota aparat khususnya yang terlibat dalam pelaksanaan program peningkatan wajib belajar 9 tahun ditingkat SD dan SMP. Adapun gambaran umum mengenai jumlah angka lulusan peserta didik SD / SMP yang terdapat di Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut⁴ :

Tabel 1.1
Kondisi Umum Pendidikan di Kabupaten Purwakarta Tingkat SD / SMP
Tahun 2005 / 2007

NO	Jenjang sekolah	Jumlah (%) Angka Mengulang	Jumlah (%) Angka Putus Sekolah	Jumlah Angka Lulusan
1	SD	2030(7,5%)	254 (0,66%)	15204 (75,66%)
2	SMP	65(2,17%)	277 (0,32%)	8847 (58,14%)

Sumber : Data Statistik BPS ; 2. RKSD 2005/2007

⁴ Dokumen, Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta (LAKIP) tahun 2005 – 2007.

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah rata-rata angka mengulang, putus sekolah dan jumlah rata-rata angka lulusan peserta didik ditingkat pendidikan dasar SD / SMP yang terdapat di Kabupaten Purwakarta dari tahun ketahun perkembangannya cukup baik dalam arti upaya yang telah dicapai Dinas Pendidikan selama ini sudah cukup baik. Namun Dinas Pendidikan juga harus merubah paradigma lama dengan paradigma baru pada bidang pendidikan agar dapat lebih menyentuh kebutuhan *riil* dimasyarakat, disamping itu masalah pendidikan hendaknya mendapat perhatian serta penanganan yang serius. Hal ini dikarenakan masih rendahnya APK dan APM, serta kurangnya sosialisasi Dinas Pendidikan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat di Kabupaten Purwakarta masih belum sepenuhnya dapat mengenyam pendidikan.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah adalah formulasi permasalahan yang akan dipecahkan atau dijelaskan melalui penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan wajib belajar 9 tahun 2005-2007 ?
2. Isu strategis apa yang terdapat di Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta ?

3. Strategi apa yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan wajib belajar 9 tahun 2005-2007 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

a. Tujuan Obyektif

- 1) Untuk mengetahui strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Purwakarta.
- 2) Mengidentifikasi variabel-variabel atau faktor-faktor pendorong dan penghambat Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Purwakarta
- 3) Mengetahui keberhasilan strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Purwakarta.

b. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif dari penelitian ini adalah

1. untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar sarjana (S1) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Disamping itu penyusun berharap penelitian ini dapat menjadi suatu sumbangan bagi disiplin Ilmu Pemerintahan, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan yang berkonsentrasi pada manajemen publik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

- 1) Memberi gambaran secara lebih nyata mengenai strategi Dinas Pendidikan dalam meningkatkan wajib belajar 9 tahun ditingkat Pendidikan Dasar Kabupaten Purwakarta.
- 2) Memberikan informasi bagi masyarakat atau pihak-pihak yang terkait mengenai strategi Dinas Pendidikan dalam meningkatkan wajib belajar 9 tahun ditingkat Pendidikan Dasar Kabupaten Purwakarta.
- 3) Memberikan input yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak pelaksana dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dimasa yang akan datang.

E. Kerangka Dasar Teori

1. Manajemen Strategis

a. Pengertian

- 1) Henry N Boetinger⁵

Ada beberapa ahli yang mendefinisikan pengertian manajemen strategis :

- a) Pandangan seniman
- b) Pengetahuan dan teknis
- c) Teknik dan komunikasi yang berhasil

⁵ Henry N Boetinger *Pengantar Manajemen dan Pengambilan Keputusan Strategik*, tahun 1995, Jakarta, halaman. 39.

Dalam hal ini manajemen merupakan suatu seni, maka manajemen memerlukan ketiga unsur tersebut. Oleh karena itu keterampilan manajemen, keterampilan seni juga dikembangkan melalui training. Keterampilan manajemen juga dikembangkan dengan cara yang sama.

2) Luter Gulick⁶

Mendefinisikan manajemen sebagai bidang pengetahuan yang mencari secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana orang-orang dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan dan mewujudkan kerjasama itu berguna untuk kemanusiaan. Manajemen memenuhi syarat untuk disebut sebagai bidang pengetahuan karena telah dipelajari bertahun-tahun dan telah diatur-atur menjadi serangkaian teori-teori.

3) I. H. Walson dan Oey Liang Lie⁷

Manajemen dikatakan bahwa, manajemen dikatakan sebagai ilmu dan seni. Sebagai ilmu karena manajemen suatu kumpulan pengetahuan-pengetahuan yang sistematis dan telah diterima sebagai kebenaran-kebenaran yang universal. Sebagai ilmu, manajemen memiliki asas-asas seperti ilmu lainnya yang disebut “*asas manajemen*”. Manajemen dinyatakan sebagai seni karena

⁶Luter Gulick, *Ibid*, halaman 41

⁷I. H. Walson dan Oey Liang Lie, *Ibid*, halaman 42

keberhasilan pemimpin dalam usahanya mencapai tujuan dengan bantuan bawahan, selain itu diperlukan pemahaman dan pengalaman ilmu manajemen. Atasan mempengaruhi bawahan dengan wibawa, karisma, atau seni memimpin orang. Dengan ilmu manajemen, seorang pemimpin mampu mengenali dan mempelajari masalah-masalah dengan baik dan menentukan sikap, mengambil keputusan dan memecahkan masalah secara cepat dan tepat.

4) James A. F. Stoner⁸

Mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan dan pengkoordinasian, kepemimpinan dan pengawasan.

Dari definisi diatas dapat ditarik beberapa pokok pikiran sebagai berikut :

- a) Proses adalah suatu cara sistematis untuk melakukan suatu manajemen yang didefinisikan sebagai suatu proses. Karena semua pemimpin memiliki kemampuan, keahlian keterampilan yang terlibat dalam kegiatan yang saling berkaitan dalam upaya mencapai tujuan organisasi
- b) .Perencanaan, menunjukan berarti para pemimpin memikirkan tujuan dan kegiatan sebelum melakukan kegiatan pada suatu cara, rencana dan logika.

⁸James A. F. Stoner, *Ibid*, halaman 42

- c) Pengorganisasian, berarti para pemimpin mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi.
- d) Memimpin ini menunjukkan bagaimana para pemimpin mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya, menggunakan orang lain untuk tugas tertentu.
- e) Pengawasan, para pemimpin berusaha untuk menyakinkan bahwa organisasi bergerak pada arah atau jalur tujuan, apabila organisasi berjalan pada jalur yang salah maka para pemimpin berusaha mencari permasalahannya dan mengembalikan pada jalur yang benar.

Dalam kegiatan ekonomi strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengkaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan. Definisi lain strategi adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka yang dimaksud strategi dalam penelitian ini adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.

Jadi, manajemen strategi adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran organisasi

dalam upaya pencapaian tujuan karena pemimpin setiap organisasi berupaya untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi apapun tujuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi, manajemen strategis adalah suatu proses untuk mencapai tujuan tersebut.

b. Manfaat Manajemen Strategis

Manajemen strategis memiliki peran yang sangat signifikan dalam membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Manajemen strategis berfungsi sebagai sarana untuk mengkomunikasikan tujuan organisasi dan jalan yang hendak ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut.

1) Manfaat Finansial

Manfaat paling utama adalah tendensi untuk menaikkan tingkat keuntungan meskipun tidak secara otomatis dengan menerapkan manajemen strategis.

2) Manfaat Non-Financial

- a) Membantu mengidentifikasi, memprioritaskan dan mengeksploitasi peluang.
- b) Menyiapkan pandangan terhadap manajemen problem
- c) Menggambarkan *framework* untuk meningkatkan koordinasi dan control terhadap aktivitas
- d) Meminimumkan pengaruh dari perubahan
- e) Memungkinkan keputusan utama untuk mendukung tujuan yang ditetapkan

- f) Memungkinkan alokasi waktu dan sumberdaya yang lebih efektif untuk mengidentifikasi peluang
- g) Memungkinkan penggunaan sumberdaya dan waktu yang lebih sedikit
- h) Membantu perilaku yang lebih terintegrasi dan individu untuk mencapai *total effort*

c. Tahap-tahap Manajemen Strategis

Mengingat perumusan langkah strategis penelitian ini menggunakan model manajemen strategis, maka dalam menganalisa dan digunakan uraian proses analisis yang mengacu pada model tersebut, yang dalam hal ini dibagi dalam beberapa tahapan proses sebagai berikut :

1) Identifikasi mandat dan misi organisasi

Mandat merupakan apa yang diharuskan dan diwajibkan oleh pihak yang lebih tinggi otoritasnya termasuk yang diharapkan dari masyarakat lokal sendiri. Sedangkan misi adalah pernyataan tentang untuk apa suatu organisasi atau lembaga didirikan atau misi merupakan justifikasi tentang kehadiran suatu lembaga, mengapa lembaga tersebut mengerjakan apa yang dikerjakan. Mandat dari sisi inilah yang digunakan sebagai titik tolak dalam mengukur kinerja organisasi itu.

Langkah pertama dalam perencanaan strategis ini dimaksudkan untuk mempertegas kembali apa yang sebenarnya. Pengidentifikasian ini dilakukan dengan mengkomparasikan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pandangan *stakeholders* terkait.

2) Analisis lingkungan strategis

Untuk merespon secara efektif terhadap perubahan lingkungannya, organisasi publik harus memahami lingkungan eksternal dan lingkungan internalnya. Sehingga mereka dapat mengembangkan strategi yang efektif dan mengaitkan kedua lingkungan tersebut.

Pemahaman terhadap lingkungan internal berguna untuk mengetahui kekuatan (*strenght*) dan kelemahan (*weakness*). Sedangkan lingkungan eksternalnya untuk mengetahui peluang (*oportunities*) dan ancaman (*threats*). Pemahaman atas kondisi kedua lingkungan tersebut digunakan sebagai pijakan dalam menganalisis SWOT (*strength, weakness, opportunities, threats*) untuk merumuskan isu strategis pada tahapan berikutnya.

1. Analisis lingkungan internal dilakukan terhadap :

- a) Sumber data yang dimiliki (*input*) meliputi SDM, dana, sarana / fasilitas, struktur dan budaya organisasi.

b) Strategi yang sedang digunakan dalam mengelola input

c) Kinerja (*output*) yang ingin dicapai saat ini.

2. Sedangkan analisis lingkungan eksternal dilakukan melalui :

a) Pemantauan terhadap ragam kecenderungan dan kekuatan politik, sosial, teknologi, fisik dan pendidikan.

b) Mengamati *steakholder* luar yang berpengaruh secara *clien, customer*, para pembuat kebijakan (DPRD).

c) Mengamati *compotitor* dan *collaborator* yang ada.

3) Analisis isu strategis

Pengidentifikasian isu strategis merupakan inti dari perencanaan strategis. Karena isu strategis pertanyaan, kebijakan mendasar yang harus ditemukan jawabannya dalam upaya mewujudkan mandat dan misi organisasi. Dalam mengidentifikasi isu strategis study ini menggunakan pendekatan langsung (*the direct approach*) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a) Mempelajari visi dan misi

b) Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, peluang serta ancaman.

c) Mengidentifikasi isu-isu strategisnya.

4) Analisis critical isu strategis

Proses mengidentifikasi isu strategis merupakan proses yang cukup rumit, sehingga perlu dilakukan berbagai pengujian lebih lanjut terhadap isu-isu strategis yang lebih berhasil diidentifikasi, karena bukan tidak mungkin isu itu tidak cukup strategis. Untuk itu diperlukan sebagai alat ukur / tes untuk melihat seberapa strategis isu tersebut, sehingga terjaring isu-isu yang benar-benar strategis (*critical strategic issues*).

d. Perumusan Strategis

Pada dasarnya strategis merupakan garis besar (*out line*) respon organisasi terhadap tantangan-tantangan mendasar yang dihadapi. Oleh karena itu, strategi harus dirumuskan selaras dengan isu strategis yang telah diidentifikasi.

Dalam perumusan strategis ini dilakukan pendekatan lima tahap proses perumusan strategis adalah sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi alternatif-alternatif umum yang dapat digunakan untuk menjawab isu-isu strategis.
- 2) Mempelajari kendala-kendala yang kemungkinan muncul dalam pelaksanaan alternatif-alternatif tersebut.
- 3) Merumuskan usulan-usulan utama yang dapat digunakan untuk mewujudkan alternatif-alternatif tersebut, sekaligus mengantisipasi kemungkinan kendala-kendala.

- 4) Merumuskan kegiatan utama yang harus dilakukan dalam empat tahun kedepan.

2. Pendidikan

Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha manusia dalam mencari ilmu, untuk meningkatkan kemampuan jasmani dan rohani yang dilakukan secara sadar, sehingga terbentuk sikap etis, kreatif, dan rasional dalam mewarisi peradaban dan mengembangkan sebagai insan social.

Proses pendidikan berlangsung terus menerus dan bentuknya berbeda-beda, serta dapat diperoleh melalui pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah (PLS).

Pengertian pendidikan menurut :

- Mashruri

“Pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan jalan sadar demi pembinaan pribadi, dan mengembangkan kemampuan manusia Indonesia jasmani dan rohani didalam keluarga, sekolah, masyarakat, dalam rangka pembangunan persatuan bangsa Indonesia dan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila”⁹.

- Heidjrachman dan Suad Hunan

⁹ Mashruri, *Kebijakan dan Langkah Pendidikan*, Departemen P & K, 1973, halaman 15

“Pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk didalamnya peningkatan penguasaan teori dan keterampilan memutuskan persoalan-persoalan yang menyangkut pemakaian tujuan”¹⁰.

- Sukirin

“Pendidikan merupakan suatu usaha membimbing seseorang individu agar ia tumbuh dan berkembang menjadi yang dapat memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan sosialnya”¹¹.

Dalam pendidikan sekolah umumnya menggunakan jenjang pendidikan dimana tahap pendidikan dilakukan secara berkelanjutan, yang ditetapkan berdasarkan perkembangan anak didiknya, dari tingkat kerumitan bahan pengajaran dan cara menyajikan bahan pengajaran. Jenjang pendidikan ini terdiri dari Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.

Sedangkan dalam dunia pendidikan jenis pendidikan dibagi menjadi tiga bagian, antara lain yaitu :

a. Pendidikan Formal

Menurut Sanapiah Faisal Pendidikan formal adalah sebagai berikut:

¹⁰ Heidjrachman dan Suad Hunan, *Manajemen Personalia*, BPFE UGM Yogyakarta 1982, halaman. 70.

¹¹ Sukirin, *Pokok-pokok Psikologi Pendidikan*, FIP IKIP, Yogyakarta, 1986, halaman. 24-25

“Pendidikan yang bentuknya telah terstruktur secara hierarkhis, bentuk-bentuk secara kronologis dalam masalah pendidikan. Contohnya Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SMP, SMU, Akademi dan Perguruan Tinggi.”.

Sedangkan menurut Noeng Muhadjir, pendidikan formal diartikan sebagai berikut :

“Pendidikan adalah pendidikan yang terstruktur mengenai umur, wakt dan urutan. Pendidikan formal mempunyai kurikulum standar akademi serta sistem upah yang relatif netral”¹².

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah pendidikan yang mempunyai struktur yang jelas, memiliki aturan yang ketat dan berstruktur tingkatannya serta memiliki pengelolaan pendidikan yang teratur. Dan pendidikan formal ini telah diatur Pemerintah dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraannya serta telah memiliki fasilitas yang memadai.

Ciri pendidikan formal adalah :

- 1) Diselenggarakan secara khusus bagi jenjang atas yang dimiliki secara *hierarkhis*.

¹² Noeng Muhadjir, *Kepemimpinan Adopsi Inovasi Masyarakat*, Rake Presm, Yogyakarta, 1983, halaman. 42.

- 2) Usia siswa disuatu jenjang relatif homogen
- 3) Waktu pendidikan relatif lama sesuai dengan program pendidikan yang harus diselesaikan
- 4) Isi pendidikan (materi) lebih banyak, bersifat akademis dan umum.
- 5) Mutu pendidikan sangat ditekankan sebagai jawaban terhadap kebutuhan dimasa yang akan datang

b. Pendidikan Nonformal

Menurut Sanapiah Faisal, pengertian pendidikan non-formal adalah sebagai berikut¹³ :

“Pendidikan non-formal adalah sebagai penyelenggara pendidikan persekolahan, isi pendidikannya terprogram, adanya konsekuensi materi, dan interaksi belajar yang sedikit banyak terkontrol serta adanya *krendosial* meskipun tidak memiliki sanksi legal”.

Ciri pendidikan Non-Formal :

- 1) Diselenggarakan sengaja di luar sekolah, peserta umumnya mereka yang sudah tidak bersekolah.
- 2) Pada umumnya tidak terbagi dalam jenjang
- 3) Peserta tidak perlu homogen
- 4) Ada waktu belajar dan metode formal, serta evaluasi sistematis

¹³ Sanapiah Faisal, *Pendidikan Luar Biasa Dalam Pendidikan dan Pembangunan Nasional*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, halaman. 51

- 5) Isi pendidikan bersifat praktis dan khusus
- 6) Keterampilan kerja sangat di tekankan, sebagai jawaban terhadap kebutuhan meningkatnya taraf hidup.

c. Pendidikan Informal

Secara umum pendidikan informal diartikan sebagai pendidikan yang diperoleh manusia sejak ia dilahirkan sampai kematiannya yang dilakukan dengan sadar, karenanya pendidikan ini penting untuk lebih mengenal diri dan lingkungan serta mampu beradaptasi. Pendidikan ini juga lebih akan menimpa manusia dalam menghadapi tantangan hidup

Lebih lanjut Sanapiah Faisal mengatakan yang dimaksud dengan pendidikan informal adalah sebagai berikut :

“Segala macam penyelenggaraan aktifitas melembaga yang fungsi pendidikannya berlangsung secara wajar dan lebih bersifat sebagai pengalaman individu mandiri dan tidak memiliki *kredensial* nilai”¹⁴.

Ciri pendidikan informal adalah :

- 1) Tidak diselenggarakan secara khusus
- 2) Medan (lingkaran) pendidikannya adalah diadakannya dengan maksud khusus menyelenggarakan pendidikan.

¹⁴ *Ibid*, halaman. 52

- 3) Tidak diprogramkan secara tertentu
- 4) Metode tidak formal.
- 5) Tidak ada evaluasi yang sistematis.
- 6) Tidak diselenggarakan oleh pemerintah.

3. Pemerintah Daerah

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 menerapkan negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik, menganut asas Desentralisasi dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah.

Selanjutnya dalam pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan dengan jelas bahwa :

“Pembangunan Daerah di Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system Pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul Daerah yang bersifat istimewa”.

Ketentuan yang terdapat dalam pasal 18 UUD 1945 tersebut hanya memberikan aturan pokok tentang pembangunan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan desentralisasi dan Dekonsentrasi. Sedangkan pengaturan lebih lanjut ditungkan dalam Undang-undang organiknya sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa, pertimbangan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah

pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat yang tetap mencerminkan pemerintah yang bersendikan atas dasar permusyawaratan.

Dalam Undang-undang organik yang mengatur tentang Pemerintah Daerah sekarang yaitu Undang-undang nomor 22 tahun 1999, pengertian Pemerintah Daerah¹⁵ adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah. Adapun perangkat Daerah otonom adalah Dinas-dinas yang membidangi berbagai bidang, dan termasuk didalamnya adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta sebagai penindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan Pendidikan. Untuk menyelenggarakan tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan pada Bidang Pendidikan.

Dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 maka terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan Pemerintahan Daerah.

Secara teoritis ada enam elemen utama yang membentuk Pemerintahan Daerah¹⁶ adalah sebagai berikut :

- a) Adanya urusan otonomi yang merupakan dasar dari kewenangan Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

¹⁵ UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Karya Utama Surabaya.halaman 12.

¹⁶ Affandi Nur Achmad, *Isu-isu Strategis Penataan Otonomi Daerah Dalam Strategi Pemberdayaan Daerah Dalam Konteks Otonom*, Yogyakarta 2000

- b) Adanya Kelembagaan yang merupakan perwadahan dari otonomi yang diserahkan kepada Daerah
- c) Adanya personil pegawai yang bertugas untuk menjalankan urusan otonomi yang menjadi isi rumah tangga Daerah
- d) Adanya sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi Daerah
- e) Adanya unsur perwakilan yang merupakan perwujudan dari wakil-wakil rakyat yang mendapat Legitimasi untuk memimpin penyelenggaraan otonomi Daerah
- f) Adanya manajemen urusan otonomi yaitu penyelenggaraan otonomi Daerah agar dapat berjalan secara efisien, efektif, ekonomis dan akuntabel

Menurut Undang-undang nomor 22 tahun 1999 Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Selanjtnya dapat dijelaskan bahwa DPRD bukanlah bagian dari Pemerintah Daerah. Ia merupakan Badan Legislatif Daerah sekaligus sebagai Lembaga pengaeasan Pemerintah. Dengan demikian diharapkan aspirasi rakyat akan semakin tersalur dan kontrol masyarakat pun akan semakin kuat dan terbuka.

Berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Daerah diberikan kewenangan yang luas nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi Daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya local dengan memperhatikan potensi dan keragaman budaya. Dengan pelimpahan kewenangan yang luas kepada daerah diharapkan Daerah dapat dengan leluasa mengatur prakarsa sendiri sesuai dengan kondisi an potensi Daerahnya.

Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang Pemerintah. Kecuali kewenangan yang telah menjadi urusan Pemerintah Pusat. Kewenangan Pemerintah Pusat itu antara lain meliputi bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya.

F. Definisi Konsepsional

Yang dimaksud dengan definisi konsepsional adalah bahwa dalam tahap ini berusaha menjelaskan mengenai pembatas pengertian suatu konsep dengan konsep lain yang merupakan suatu abstraksi hal-hal yang diamati agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan demikian definisi konsepsional adalah unsure penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena social atau fenomena alami¹⁷.

¹⁷ Masri singarimbun dan sofyan effendi, *methodology penelitian survey*, Jakarta, 1981, hal. 17

- a. Manajemen strategis adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membentuk pencapaian sasaran.
- b. Pendidikan adalah pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh seseorang baik melalui pendidikan formal maupun non formal yang digunakan sebagai pendukung utama dalam melaksanakan segala aktivitas agar mudah lancar dan tepat dalam menyelesaikan pembangunan yang akan dilaksanakan.
- c. Meningkatkan merupakan suatu upaya untuk menyempurnakan dan memperbaiki yang telah ada.
- d. Pemerintah daerah adalah bagian dari pemerintah suatu Negara yang berdaulat yang di bentuk secara politis berdasarkan undang-undang atau badan yang menjalankan pemerintah yang dipilih dan masyarakat daerah tersebut dan dilengkapi dengan kewenangan untuk membuat peraturan memungut pajak serta memberikan pelayanan kepada warga yang ada di wilayah kekuasaannya.
- e. Wajib belajar 9 tahun adalah suatu program bersama antara pemerintah, swasta dan lembaga-lembaga social serta masyarakat. Adapun upaya untuk menggerakkan semua komponen bangsa melalui gerakan nasional dengan pendekatan budaya, sosial, agama, birokrasi, legal formal perlu dilakukan dengan maksud untuk menyadarkan mereka yang belum memahami pentingnya pendidikan dan menggalang partisipasi masyarakat untuk mensukseskan program nasional tersebut.

G. Definisi Operasional

Agar suatu penelitian dapat diukur maka variabelnya perlu di operasionalkan. Dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian, seorang peneliti akan mengetahui pengukuran suatu variable. Sehingga seorang peneliti akan mengetahui baik dan buruknya pengukuran. Adapun indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi Mandat Dinas Pendidikan
 - a) Mandat Dinas Pendidikan
 - b) Memperjelas visi dan misi Dinas
 - c) Tujuan dan sasaran Dinas
 - d) Kebijakan dan Program
2. Analisis lingkungan strategis (SWOT)
 - a. Analisis lingkungan internal (*kekuatan / S* dan *kelemahan / W*)
 - 1) Kecakupan sumberdaya manusia.
 - 2) Kinerja yang dicapai Dinas
 - 3) Ketersedian sarana dan prasarana
 - b. Analisis lingkungan eksternal (*peluang / O* dan *ancaman / T*)
 - 1) Prilaku masyarakat Kabupaten Purwakarta.
 - 2) Kerjasama dengan pemerintah daerah atau dengan instansi lain.
 - 3) Teknologi dalam peningkatan wajib belajar 9 tahun di tingkat Pendidikan Dasar.

3. Analisis isu strategi
 - a. Pelaksanaan teknis operasional Bidang SD dan SMP dalam pemerataan wajib belajar 9 tahun.
 - b. Kesesuaian regulasi teknis operasional dengan kebijakan yang berlaku
4. Analisis strategi
 - a. Keterampilan aparat Dinas serta pemeliharaan sarana dan prasarana.
 - b. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah / Keputusan Bupati pada bidang pendidikan di tingkat SD dan SMP.
 - c. Pelaksanaan pengawasan / pengendalian dan pelaporan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan diskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati¹⁸. Berkaitan dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai maka pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan deskriptif yang tujuannya adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang di selidiki.

2. Lokasi Penelitian

¹⁸ Molung Lexy J, *Metode penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999, hal.3

Penelitian ini berlokasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Dipilihnya lokasi ini karena penyusun ingin mengetahui rencana strategi yang telah disusun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

3. Unit Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka unit-unit penelitian disini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta melalui bidang SD dan SMP. Sedangkan sumber utama data-data dapat di peroleh dari anggota aparat Bidang SD dan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

4. Sumber Data

Bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan¹⁹. Oleh karena itu sumber data utama dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data skunder. Adapun data-data tersebut adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Adalah data *authentic* atau data langsung yang diperoleh penulis dari permasalahan yang diungkapkan. Data tersebut diperoleh dari instansi yang terkait dengan penelitian mengenai perencanaan strategi Dinas dalam meningkatkan wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Purwakarta,

¹⁹ Ibid, hal. 112.

instansi tersebut adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta beserta aparat Dinas Pendidikan dan masyarakat Kabupaten Purwakarta.

b. Data Skunder

Adalah data yang tidak diusahakan sendiri secara langsung atau data yang diperoleh dari literature-literatur atau buku-buku, dokumen-dokumen, artikel atau catatan yang diperoleh dari instansi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode :

a. Wawancara (*interview*)

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti atau pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber yang dianggap representatif. Teknik yang digunakan melalui wawancara terstruktur yang mana peneliti disini sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, serta wawancara bebas yang bertujuan untuk mencagah hal yang tidak tertampung dalam wawancara terstruktur. Wawancara dilakukan terhadap sumber informasi utama yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Kepala Bidang SD dan SMP serta anggota aparat Bidang SD dan SMP, Kepala

Seksi Kurikulum dan Tenaga Teknis, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan SD dan SMP, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang SD dan SMP serta Masyarakat.

b. Dokumentasi.

Adalah teknik pengumpulan data dengan mempergunakan bahan-bahan tertulis sebagai dokumen dalam bentuk laporan, literature-literatur, dokumen-dokumen instansi terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dan internet.

6. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini digunakan metode analisa kualitatif untuk menganalisa data yang diperoleh. Data-data yang terkumpul akan diinterpretasikan sesuai dengan arti data yang disesuaikan dengan tujuan dan kepentingan penelitian. Sesuai dengan tujuan penelitian data deskriptif dipakai untuk membuat gambaran secara sistematis mengenai hubungan antara fenomena yang diselidiki, dalam hal ini berusaha untuk menggambarkan perencanaan strategi Dinas Pendidikan dalam meningkatkan wajib belajar 9 tahun ditingkat SD dan SMP di Kabupaten Purwakarta.

Ada pun mengenai penelitian yang bersifat kualitatif, Winarno Surachman menjelaskan sebagai berikut²⁰ :

²⁰ Winarno Surachman, *Dasar-dasar Teknik Research*, Tarsito, Bandung. 1978, Halaman. 126.

“Sifat dari bentuk penelitian deskriptif ini adalah menuturkan dan menafsirkan data yang ada misalnya, tentang situasi yang dialami, suatu hubungan kegiatan, pandangan sikap yang nampak atau tentang proses yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang sedang nampak, pertentangan yang sedang meruncing dan sebagainya”.